



BUPATI LUWU
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU
NOMOR : 12 TAHUN 2016

TENTANG

PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN LUWU
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan ketentuan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ketentuan mengenai pengalokasian dan pembagian ADD diatur dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2016.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 257/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Dana Perimbangan terhadap Daerah yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 12 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2016;
15. Peraturan Bupati Luwu Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
16. Peraturan Bupati Luwu Nomor 77 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN LUWU TAHUN ANGGARAN 2016**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Luwu.
3. Bupati adalah Bupati Luwu;
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia;
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa;
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa;
8. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disebut ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk Desa, yang bersumber dari bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;
9. Alokasi Dana Desa Minimal yang selanjutnya disebut ADDM adalah besaran bagian ADD yang sama untuk setiap Desa dengan persentase 70% (*tujuh puluh per seratus*) dari total ADD Kabupaten
10. Alokasi Dana Desa Proporsional yang selanjutnya disebut ADDP adalah besaran bagian ADD yang dibagi secara proporsional untuk setiap Desa berdasarkan nilai bobot Desa yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu dengan persentase 30% (*tiga puluh per seratus*) dari total ADD Kabupaten;

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini yaitu untuk memberikan landasan hukum dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam mengalokasikan ADD.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan kepastian hukum dan tertib administrasi dalam penyusunan APB Desa masing-masing desa yang bersumber dari ADD.

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Pendanaan dan besaran ADD;
- b. Penentuan besaran ADD;
- c. Ketentuan penutup

BAB III PENDANAAN DAN BESARAN ADD

Pasal 5

- (1) Pendanaan ADD bersumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pendanaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (*sepuluh per seratus*) dari dana perimbangan yang diterima daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- (3) Besaran ADD untuk masing-masing desa untuk tahun Anggara 2016 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENENTUAN BESARAN ADD

Pasal 6

- (1) Penentuan besaran Alokasi Dana Desa masing-masing desa dilakukan dengan menggunakan rumus yang memperhitungkan asas pemerataan dan asas keadilan;
- (2) Asas pemerataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bagian ADD yang sama untuk setiap desa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM);
- (3) Asas keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bagian ADD yang besarnya dibagi secara proporsional untuk setiap desa berdasarkan Nilai Bobot Desa (BDx), yang dihitung berdasarkan potensi desa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP).
- (4) Potensi desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung berdasarkan variabel jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, angka kemiskinan desa dan jarak/ keterjangkauan.

Pasal 7

Penghitungan ADD untuk setiap desa sebagaimana dimaksud Pasal 5, ditentukan sebagai berikut :

- a. Rumus dasar penetapan ADD :

$$\sum \text{ADD} = \sum (\text{ADDM} + \text{ADDP})$$

Dimana:

ADD = Alokasi Dana Desa.

ADDM = Alokasi Dana Desa Minimal (perolehan desa sama) sebesar 70% (*tujuh puluh per seratus*).

ADDP = Alokasi Dana Desa Proporsional (berdasarkan koefisien variabel-variabelnya) sebesar 30% (*tiga puluh per seratus*).

- b. Formula Penerimaan ADD kepada desa :

1. Rumus Penerimaan Desa

$$\text{ADD}_x = \text{ADDM} + \text{BD}_x (\text{ADDP})$$

Dimana:

BD_x = Nilai Bobot Desa pada desa X

2. Rumus Penetapan Nilai Bobot Desa (BD_x)

$$\text{BD}_x = a_1 \text{KV}_1 + a_2 \text{KV}_2 + \dots a_n \text{KV}_n$$

Dimana:

$a_1, a_2 \dots a_n$ = Angka Bobot dari masing-masing variabel.

$\text{KV}_1, \text{KV}_2 \dots \text{KV}_n$ = Koefisien masing-masing variabel.

Perhitungan koefisien variabel desa x

- 1). Koefisien variabel Jumlah Penduduk dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah penduduk di desa yang bersangkutan dibandingkan dengan jumlah penduduk desa se Kabupaten Luwu.
- 2). Koefisien variabel Luas Desa dihitung berdasarkan perbandingan antara luas di desa yang bersangkutan dibandingkan dengan jumlah luas desa se Kabupaten Luwu.
- 3). Koefisien variabel Kemiskinan dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah rumah tangga miskin di desa yang bersangkutan dibandingkan dengan jumlah rumah tangga miskin seluruh desa Kabupaten Luwu.
- 4). Koefisien variabel Keterjangkauan dihitung berdasarkan perbandingan antara hasil penjumlahan ($0,3 \times$ jarak ibukota desa dengan ibukota Kabupaten) ditambah ($0,7 \times$ jarak ibukota desa dengan ibukota kecamatan) dengan jumlah skor penjumlahan jarak desa ke ibukota Kabupaten dan Kecamatan.

c. Penetapan Variabel dan Bobot Variabel

VARIABEL	NOTASI VARIABEL	NOTASI BOBOT	BOBOT
1. Jumlah Penduduk	V_1	a_1	30%
2. Luas Desa	V_2	a_2	20%
3. Kemiskinan Desa	V_3	a_3	30%
4. Keterjangkauan	V_4	a_4	20%
JUMLAH			100%

d. Sumber data dari variabel sebagaimana dimaksud pada huruf c adalah:

- Jumlah penduduk desa, bersumber dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu;
- Luas desa, bersumber dari Biro Pusat Statistik Kabupaten Luwu
- Angka kemiskinan desa, bersumber dari data Rumah Tangga Penerima Beras Miskin pada Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Luwu
- Keterjangkauan bersumber dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu.

Ditetapkan di Luwu
pada tanggal 13 Januari 2016

BUPATI LUWU,

A. MUDZAKKAR

Diundangkan di Belopa
pada tanggal 13 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,


SYAIFUL ALAM

PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN LUWU
TAHUN ANGGARAN 2016

RINCIAN BESARAN ALOKASI DANA DESA UNTUK SETIAP DESA DI KABUPATEN LUWU
TAHUN ANGGARAN 2016

No.	Nama Desa	ADD Minimal (Rp)	ADD Proporsional (Rp)	Pagu ADD per-Desa (Rp)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)
	KECAMATAN BASSE SANGTEMPE				
1	KANNA	239,484,541	74,964,993	314,450,000	
2	KANNA UTARA	239,484,541	129,855,743	369,340,000	
3	TABI	239,484,541	102,634,847	342,119,000	
4	BOLU	239,484,541	133,809,694	373,294,000	
5	LANGE	239,484,541	86,848,864	326,333,000	
6	SINAJI	239,484,541	113,041,780	352,526,000	
7	MAPPETAJANG	239,484,541	97,313,500	336,798,000	
8	ANDULAN	239,484,541	61,464,403	300,949,000	
9	BUNTU BATU	239,484,541	84,623,647	324,108,000	
10	LEDAN	239,484,541	89,738,902	329,223,000	
11	LISSAGA	239,484,541	60,828,590	300,313,000	
12	TO'LONG	239,484,541	113,481,116	352,966,000	
	KECAMATAN LAROMPONG				
13	RANTE BELU	239,484,541	95,236,877	334,721,000	
14	KOMBA	239,484,541	128,573,944	368,058,000	
15	LUMARING	239,484,541	129,750,588	369,235,000	
16	BINTURU	239,484,541	159,978,425	399,463,000	
17	BILANTE	239,484,541	53,606,308	293,091,000	
18	RANTE ALANG	239,484,541	198,088,096	437,573,000	
19	RIWANG	239,484,541	87,792,358	327,277,000	
20	BUNTU MATABING	239,484,541	70,213,584	309,698,000	
21	BUKIT SUTRA	239,484,541	191,724,311	431,209,000	
22	RIWANG SELATAN	239,484,541	57,598,615	297,083,000	
23	KOMBA SELATAN	239,484,541	60,242,722	299,727,000	
24	BUNTU PASIK	239,484,541	87,210,593	326,695,000	
	KECAMATAN SULI				
25	MURANTE	239,484,541	97,414,672	336,899,000	
26	MALELA	239,484,541	70,797,474	310,282,000	
27	BOTTA	239,484,541	83,383,734	322,868,000	
28	CIMPU	239,484,541	81,718,017	321,203,000	
29	BUNTU KUNYI	239,484,541	73,811,005	313,296,000	
30	PADANG LAMBE	239,484,541	55,834,260	295,319,000	
31	KASIWIANG	239,484,541	39,615,079	279,100,000	

No.	Nama Desa	ADD Minimal (Rp)	ADD Proporsional (Rp)	Pagu ADD per-Desa (Rp)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)
32	CAKKEAWO	239,484,541	57,195,144	296,680,000	
33	LEMPOPACCI	239,484,541	45,303,369	284,788,000	
34	TOWONDO	239,484,541	84,021,518	323,506,000	
35	CIMPU UTARA	239,484,541	69,019,599	308,504,000	
36	PAPAKAJU	239,484,541	77,090,519	316,575,000	
	<u>KECAMATAN BAJO</u>				
37	RUMAJU	239,484,541	71,463,786	310,948,000	
38	SAMPA	239,484,541	73,550,296	313,035,000	
39	PANGI	239,484,541	62,681,106	302,166,000	
40	TALANG BULAWANG	239,484,541	115,896,854	355,381,000	
41	JAMBU	239,484,541	50,080,220	289,565,000	
42	SAGA	239,484,541	37,121,877	276,606,000	
43	SUMABU	239,484,541	53,564,029	293,049,000	
44	BALLA	239,484,541	50,345,692	289,830,000	
45	LANGKIDDI	239,484,541	60,736,728	300,221,000	
46	SAMULANG	239,484,541	29,157,481	268,642,000	
47	BUNTU BABANG	239,484,541	77,807,946	317,292,000	
	<u>KECAMATAN BUA PONRANG</u>				
48	TANJONG	239,484,541	117,473,721	356,958,000	
49	BUNTU BATU	239,484,541	103,300,143	342,785,000	
50	TAMPUMIA	239,484,541	88,733,332	328,218,000	
51	PADANG TUJU	239,484,541	84,989,668	324,474,000	
52	PADANG KAMBURI	239,484,541	39,421,451	278,906,000	
53	MALENGGANG	239,484,541	105,420,664	344,905,000	
54	BALUTAN	239,484,541	198,090,573	437,575,000	
55	PADANG MA'BUD	239,484,541	68,271,708	307,756,000	
56	SALUINDUK	239,484,541	75,694,046	315,179,000	
	<u>KECAMATAN WALENRANG</u>				
57	TOMBANG	239,484,541	180,015,551	419,500,000	
58	LALONG	239,484,541	133,337,772	372,822,000	
59	HARAPAN	239,484,541	145,488,719	384,973,000	
60	BARAMMAMASE	239,484,541	142,487,155	381,972,000	
61	WALENRANG	239,484,541	125,607,938	365,092,000	
62	SARAGI	239,484,541	83,515,501	323,000,000	
63	BATUSITANDUK	239,484,541	141,835,357	381,320,000	
64	KALIBAMAMASE	239,484,541	109,800,952	349,285,000	
	<u>KECAMATAN BELOPA</u>				
65	KURUSUMANGA	239,484,541	52,728,010	292,213,000	
66	BELOPA	239,484,541	85,830,935	325,315,000	
67	SENGA SELATAN	239,484,541	108,788,442	348,273,000	
68	BALUBU	239,484,541	50,324,121	289,809,000	
69	PASAMAI	239,484,541	47,637,929	287,122,000	

No.	Nama Desa	ADD Minimal (Rp)	ADD Proporsional (Rp)	Pagu ADD per-Desa (Rp)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)
	<u>KECAMATAN BUA</u>				
70	BAROWA	239,484,541	88,270,705	327,755,000	
71	PUTY	239,484,541	170,142,670	409,627,000	
72	RAJA	239,484,541	109,299,592	348,784,000	
73	POSI	239,484,541	182,434,570	421,919,000	
74	KARANG-KARANGAN	239,484,541	107,123,059	346,608,000	
75	LARE-LARE	239,484,541	131,472,171	370,957,000	
76	LENGKONG	239,484,541	100,007,901	339,492,000	
77	TIROMANDA	239,484,541	177,487,006	416,972,000	
78	TANARIGELLA	239,484,541	74,155,123	313,640,000	
79	BUKIT HARAPAN	239,484,541	90,769,726	330,254,000	
80	PADANG KALUA	239,484,541	53,228,957	292,713,000	
81	PAMMESAKANG	239,484,541	56,509,312	295,994,000	
82	PABBARESSENG	239,484,541	84,361,919	323,846,000	
83	TODDOPULI	239,484,541	111,427,089	350,912,000	
	<u>KECAMATAN LAMASI</u>				
84	SALUJAMBU	239,484,541	92,569,076	332,054,000	
85	WIWITAN	239,484,541	87,922,115	327,407,000	
86	SETIAREJO	239,484,541	107,811,705	347,296,000	
87	PONGSAMELUNG	239,484,541	160,278,705	399,763,000	
88	PADANG KALUA	239,484,541	112,409,995	351,895,000	
89	TO'PONGO	239,484,541	124,680,122	364,165,000	
90	SE'PONG	239,484,541	80,561,100	320,046,000	
91	AWO GADING	239,484,541	73,177,307	312,662,000	
92	WIWITAN TIMUR	239,484,541	134,303,883	373,788,000	
	<u>KECAMATAN LAROMPONG SELATAN</u>				
93	TEMBOE	239,484,541	104,750,743	344,235,000	
94	SAMPANO	239,484,541	119,056,247	358,541,000	
95	BABANG	239,484,541	114,920,895	354,405,000	
96	LA'LOA	239,484,541	98,372,605	337,857,000	
97	BATULAPPA	239,484,541	94,752,811	334,237,000	
98	MALEWONG	239,484,541	150,946,715	390,431,000	
99	SALUSANA	239,484,541	128,846,400	368,331,000	
100	DADEKO	239,484,541	83,139,688	322,624,000	
101	GANDANG BATU	239,484,541	70,371,482	309,856,000	
	<u>KECAMATAN PONRANG</u>				
102	TIROWALI	239,484,541	143,124,680	382,609,000	
103	MARIO	239,484,541	71,442,937	310,927,000	
104	MULADIMENG	239,484,541	123,944,899	363,429,000	
105	BUNTU KAMIRI	239,484,541	142,630,242	382,115,000	
106	TUMALE	239,484,541	120,679,496	360,164,000	
107	BUNTU NANNA	239,484,541	152,303,886	391,788,000	
108	TAMPA	239,484,541	118,484,553	357,969,000	
109	PAREKAJU	239,484,541	90,760,995	330,246,000	

No.	Nama Desa	ADD Minimal (Rp)	ADD Proporsional (Rp)	Pagu ADD per-Desa (Rp)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)
	KECAMATAN LATIMOJONG				
110	RANTEBALLA	239,484,541	220,895,486	460,380,000	
111	KADUNDUNG	239,484,541	104,915,558	344,400,000	
112	ULUSALU	239,484,541	94,669,791	334,154,000	
113	LAMBANAN	239,484,541	98,815,901	338,300,000	
114	TABANG	239,484,541	145,216,684	384,701,000	
115	BONEPOSI	239,484,541	86,016,313	325,501,000	
116	PANGI	239,484,541	180,827,128	420,312,000	
117	PAJANG	239,484,541	74,385,741	313,870,000	
118	BUNTU SAREK	239,484,541	118,911,580	358,396,000	
119	TO'BARRU	239,484,541	64,689,360	304,174,000	
120	TIBUSSAN	239,484,541	105,520,044	345,005,000	
121	TO'LAJUK	239,484,541	65,550,074	305,035,000	
	KECAMATAN KAMANRE				
122	KAMANRE	239,484,541	63,439,467	302,924,000	
123	TABBAJA	239,484,541	58,103,933	297,588,000	
124	LIBUKANG	239,484,541	96,374,214	335,859,000	
125	WARA	239,484,541	70,043,537	309,528,000	
126	SALUPAREMANG	239,484,541	54,659,455	294,144,000	
127	SALUPAREMANG SELATAN	239,484,541	70,725,260	310,210,000	
128	BUNGA EJA	239,484,541	44,337,551	283,822,000	
	KECAMATAN BELOPA UTARA				
129	LAMUNRE	239,484,541	56,180,353	295,665,000	
130	LAUWA	239,484,541	46,326,972	285,812,000	
131	SEPPONG	239,484,541	80,640,414	320,125,000	
132	PACONNE	239,484,541	27,023,269	266,508,000	
133	LEBANI	239,484,541	52,225,563	291,710,000	
134	LAMUNRE TENGAH	239,484,541	63,726,946	303,211,000	
	KECAMATAN WALENRANG BARAT				
135	ILANBATU	239,484,541	189,030,089	428,515,000	
136	ILANBATU URU	239,484,541	347,589,835	587,074,000	
137	LEMPE PASANG	239,484,541	198,615,038	438,100,000	
138	LAMASI HULU	239,484,541	227,144,696	466,629,000	
139	LEMPE	239,484,541	171,166,796	410,651,000	
140	LEWANDI	239,484,541	216,407,093	455,892,000	
	KECAMATAN WALENRANG UTARA				
141	SALUTUBU	239,484,541	157,689,891	397,174,000	
142	SITEBA	239,484,541	235,018,561	474,503,000	
143	BOLONG	239,484,541	110,928,913	350,413,000	
144	PONGKO	239,484,541	164,595,186	404,080,000	
145	BUNTU AWO'	239,484,541	147,787,206	387,272,000	

No.	Nama Desa	ADD Minimal (Rp)	ADD Proporsional (Rp)	Pagu ADD per-Desa (Rp)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)
146	MARABUANA	239,484,541	133,525,920	373,010,000	
147	SALULINO	239,484,541	136,592,767	376,077,000	
148	SANGTANDUNG	239,484,541	156,357,630	395,842,000	
149	BOSSO TIMUR	239,484,541	76,276,293	315,761,000	
150	LIMBONG	239,484,541	92,678,796	332,163,000	
	KECAMATAN WALENRANG TIMUR				
151	LAMASI PANTAI	239,484,541	106,254,154	345,739,000	
152	TANETE	239,484,541	103,278,843	342,763,000	
153	RANTEDAMAI	239,484,541	110,384,688	349,869,000	
154	TABA	239,484,541	134,913,616	374,398,000	
155	KENDEKAN	239,484,541	137,728,063	377,213,000	
156	PANGALLI	239,484,541	87,408,575	326,893,000	
157	SEBA-SEBA	239,484,541	137,730,637	377,215,000	
158	SUKADAMAI	239,484,541	130,272,372	369,757,000	
	KECAMATAN LAMASI TIMUR				
159	POMPENGAN	239,484,541	114,571,406	354,056,000	
160	BULOLONDONG	239,484,541	160,607,975	400,093,000	
161	POMPENGAN PANTAI	239,484,541	99,178,743	338,663,000	
162	SERITI	239,484,541	125,641,068	365,126,000	
163	SALUPAO	239,484,541	128,185,101	367,670,000	
164	TO'LEMO	239,484,541	113,641,315	353,126,000	
165	PELALAN	239,484,541	157,047,728	396,532,000	
166	POMPENGAN TENGAH	239,484,541	91,064,834	330,549,000	
167	POMPENGAN UTARA	239,484,541	100,168,578	339,653,000	
	KECAMATAN SULI BARAT				
168	BUNTU BARANA	239,484,541	65,083,286	304,568,000	
169	PORINGAN	239,484,541	164,788,764	404,273,000	
170	SALUBUA	239,484,541	116,699,458	356,184,000	
171	KAILI	239,484,541	146,610,959	386,096,000	
172	MUHAJIRIN	239,484,541	70,133,594	309,618,000	
173	TALLANG	239,484,541	43,353,324	282,838,000	
174	KALADI DARUSSALAM	239,484,541	142,403,781	381,888,000	
	KECAMATAN BAJO BARAT				
175	BONELEMO	239,484,541	63,342,359	302,827,000	
176	SAMPEANG	239,484,541	78,085,577	317,570,000	
177	MARINDING	239,484,541	58,908,064	298,393,000	
178	SARONDA	239,484,541	70,448,312	309,933,000	
179	KADONG-KADONG	239,484,541	63,321,709	302,806,000	
180	TUMBUBARA	239,484,541	78,182,756	317,667,000	
181	TETTEKANG	239,484,541	43,803,296	283,288,000	
182	BONELEMO UTARA	239,484,541	74,361,771	313,846,000	
183	BONELEMO BARAT	239,484,541	75,096,864	314,581,000	

No.	Nama Desa	ADD Minimal (Rp)	ADD Proporsional (Rp)	Pagu ADD per-Desa (Rp)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)
	KECAMATAN PONRANG SELATAN				
184	JE'NEMAEJA	239,484,541	68,378,616	307,863,000	
185	BAKTI	239,484,541	84,987,296	324,472,000	
186	BUNTU KARYA	239,484,541	104,733,667	344,218,000	
187	OLANG	239,484,541	136,785,638	376,270,000	
188	BASSIANG	239,484,541	90,325,824	329,810,000	
189	PACCERAKKANG	239,484,541	127,164,903	366,649,000	
190	LAMPUARA	239,484,541	103,734,698	343,219,000	
191	TO'BALO	239,484,541	49,736,413	289,221,000	
192	TO'BIA	239,484,541	76,355,683	315,840,000	
193	BASSIANG TIMUR	239,484,541	112,287,565	351,772,000	
194	PATTEDONG SELATAN	239,484,541	51,049,319	290,534,000	
195	TARRAMATEKKENG	239,484,541	65,768,707	305,253,000	
	KECAMATAN BASSE SANGTEMPE UTARA				
196	BONGLO	239,484,541	81,913,359	321,398,000	
197	TEDE	239,484,541	121,175,499	360,660,000	
198	BARANA	239,484,541	81,020,819	320,505,000	
199	URASO	239,484,541	87,955,087	327,440,000	
200	KARATUAN	239,484,541	118,349,252	357,834,000	
201	SALUBUA	239,484,541	87,140,209	326,625,000	
202	PANTILANG	239,484,541	95,873,863	335,358,000	
203	BUNTU TALLANG	239,484,541	80,788,391	320,273,000	
204	DAMPAN	239,484,541	90,830,191	330,315,000	
205	MAINDO	239,484,541	126,818,346	366,303,000	
206	TASANGTONGKONAN	239,484,541	106,949,959	346,434,000	
207	TA'BA	239,484,541	83,290,146	322,784,000	
Total		49,573,300,000	21,245,700,000	70,819,000,000	

BUPATI LUWU,

A. MUDZAKKAR